

ANALISIS PENGARUH HARGA BERAS NASIONAL DAN UMP TERHADAP KONSUMSI BERAS DI SUMATERA UTARA

Jekonia Tamba¹, Natasya², Rosalina Ronaulika Simanjuntak³
jekonia.7253141006@mhs.unimed.ac.id¹, natasya.7253141004@mhs.unimed.ac.id²,
rosalina.7253141031@mhs.unimed.ac.id³
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga beras dan pendapatan masyarakat yang diukur melalui Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap konsumsi beras di Sumatera Utara periode 2010–2025. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beras dan UMP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan konsumsi beras masyarakat cenderung mengalami penurunan. Kenaikan harga beras memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Sementara itu, peningkatan UMP membantu mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya mampu mengimbangi inflasi pangan dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Penurunan konsumsi beras juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi, diversifikasi pangan, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Secara keseluruhan, harga beras dan pendapatan masyarakat memiliki pengaruh terhadap konsumsi beras di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Harga Beras, UMP, Konsumsi Beras, Daya Beli Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of rice prices and community income measured through the Provincial Minimum Wage (UMP) on rice consumption in North Sumatra during the 2010–2025 period. The study used a library research method with a quantitative descriptive approach. The data used were secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and other supporting literature. The results showed that rice prices and the Provincial Minimum Wage increased from year to year, while rice consumption tended to decline. Rising rice prices affected people's purchasing power, especially low-income communities. Meanwhile, the increase in UMP helped maintain the community's consumption ability, although it was not fully able to offset food inflation and rising prices of basic necessities. The decline in rice consumption was also influenced by changes in consumption patterns, food diversification, and lifestyle changes. Overall, rice prices and community income have an influence on rice consumption in North Sumatra.

Keywords: Rice Prices, Provincial Minimum Wage, Rice Consumption, Purchasing Power.

PENDAHULUAN

Beras merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia yang memiliki peranan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, termasuk di Sumatera Utara. Sebagai komoditas pangan strategis, beras tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi utama, tetapi juga menjadi indikator ketahanan pangan suatu daerah. Tingginya tingkat konsumsi beras di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada komoditas ini sebagai makanan pokok utama. Dalam perspektif ekonomi mikro, Mankiw (2018) menjelaskan bahwa barang kebutuhan pokok seperti beras memiliki sifat permintaan inelastis, yaitu perubahan harga tidak memberikan pengaruh besar terhadap jumlah permintaan karena barang tersebut termasuk kebutuhan esensial yang harus dipenuhi oleh rumah tangga.

Meskipun memiliki sifat inelastis, perubahan harga beras tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena beras

merupakan komponen utama pengeluaran rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, harga beras mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti produksi padi, kondisi cuaca, ketersediaan stok, distribusi, biaya transportasi, serta dinamika permintaan dan penawaran di pasar. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), beras merupakan salah satu komoditas utama penyumbang inflasi kelompok bahan makanan, sehingga perubahan harganya sangat memengaruhi tingkat inflasi dan daya beli masyarakat. Inflasi pangan yang meningkat akan menyebabkan penurunan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi secara optimal.

Selain faktor harga, variabel lain yang sangat penting dalam menentukan tingkat konsumsi adalah pendapatan masyarakat. Dalam teori ekonomi makro, Keynes (1936) menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan maka konsumsi juga akan meningkat, meskipun tidak dalam proporsi yang sama. Konsep ini dikenal sebagai *marginal propensity to consume*, yang menjelaskan bahwa setiap tambahan pendapatan akan dialokasikan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lainnya untuk tabungan. Dengan demikian, pendapatan menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan konsumsi masyarakat.

Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, pendapatan masyarakat sering direpresentasikan melalui Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu standar minimum upah yang ditetapkan pemerintah setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2016), pendapatan merupakan faktor dominan yang menentukan tingkat konsumsi masyarakat karena kemampuan seseorang dalam mengonsumsi barang dan jasa sangat bergantung pada besarnya pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, kenaikan UMP diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti beras.

Namun demikian, peningkatan pendapatan tidak selalu menjamin peningkatan kesejahteraan riil apabila tidak diiringi dengan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan oleh adanya inflasi yang dapat mengurangi nilai riil pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, jika kenaikan harga beras lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP, maka daya beli masyarakat tetap akan mengalami penurunan meskipun secara nominal pendapatan meningkat.

Lebih lanjut, Engel dalam Hukum Engel menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, maka semakin besar proporsi pendapatannya yang digunakan untuk kebutuhan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan lebih sensitif terhadap perubahan harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan pengeluaran karena porsi konsumsi pangan terhadap total pendapatan relatif lebih kecil.

Di Sumatera Utara, konsumsi beras masih tergolong tinggi karena beras merupakan makanan pokok utama masyarakat. Tingginya ketergantungan terhadap beras menyebabkan perubahan harga dan pendapatan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk juga turut meningkatkan permintaan terhadap beras dari tahun ke tahun, sehingga tekanan terhadap ketersediaan dan harga menjadi semakin besar.

Secara teoritis, hubungan antara harga beras, pendapatan, dan konsumsi menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara variabel ekonomi mikro dan makro. Perubahan harga beras memengaruhi daya beli masyarakat, sedangkan perubahan pendapatan melalui UMP memengaruhi kemampuan konsumsi rumah tangga. Interaksi antara kedua variabel tersebut menentukan tingkat konsumsi beras dalam suatu daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap

hubungan ini menjadi penting untuk memahami dinamika kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh harga beras dan pendapatan (UMP) terhadap konsumsi beras di Sumatera Utara pada periode 2010–2026. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara harga, pendapatan, dan konsumsi serta memberikan kontribusi dalam memahami kondisi daya beli masyarakat dan stabilitas ketahanan pangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, termasuk di Sumatera Utara. Sebagai komoditas utama, beras memiliki karakteristik kebutuhan yang relatif inelastis, artinya perubahan harga tidak selalu menurunkan tingkat konsumsi secara signifikan karena beras merupakan kebutuhan dasar. Menurut Mankiw (2018), barang kebutuhan pokok cenderung memiliki permintaan yang tidak elastis karena konsumen tetap membutuhkannya meskipun terjadi perubahan harga.

Harga beras menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan harga beras dapat berdampak langsung terhadap daya beli rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Menurut Badan Pusat Statistik, harga pangan merupakan salah satu komponen utama dalam pengukuran inflasi dan memiliki kontribusi besar terhadap perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi pangan terjadi ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan secara terus-menerus sehingga meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga. Faktor-faktor yang memengaruhi harga beras meliputi produksi padi, kondisi cuaca, distribusi, biaya transportasi, serta mekanisme permintaan dan penawaran di pasar.

Selain harga, faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat adalah pendapatan. Menurut Keynes (dalam teori konsumsi), konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima, di mana peningkatan pendapatan akan meningkatkan konsumsi, meskipun tidak dalam proporsi yang sama. Dalam konteks Indonesia, pendapatan masyarakat dapat diukur salah satunya melalui Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu standar minimum upah yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin kelayakan hidup pekerja. UMP ditetapkan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak.

Menurut Sukirno (2016), pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan tingkat konsumsi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok seperti beras. Sebaliknya, apabila pendapatan rendah sementara harga kebutuhan meningkat, maka daya beli masyarakat akan menurun sehingga konsumsi dapat tertekan.

Konsumsi beras merupakan jumlah penggunaan beras oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam periode tertentu. Menurut Engel (dalam Hukum Engel), semakin rendah pendapatan seseorang maka semakin besar proporsi pendapatannya yang digunakan untuk kebutuhan pangan. Hal ini menjelaskan bahwa konsumsi beras di Indonesia cenderung tinggi karena merupakan kebutuhan utama masyarakat. Tingkat konsumsi beras dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah penduduk, pendapatan, harga beras, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Di Sumatera Utara, konsumsi beras masih tergolong tinggi karena beras merupakan makanan pokok utama masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi, pertumbuhan penduduk,

serta perubahan harga dan pendapatan dapat memengaruhi pola konsumsi dari waktu ke waktu. Ketika harga beras meningkat dan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, maka daya beli masyarakat akan menurun sehingga konsumsi beras dapat berkurang. Sebaliknya, jika pendapatan meningkat, konsumsi cenderung dapat dipertahankan atau meningkat.

Hubungan antara harga beras, pendapatan (UMP), dan konsumsi beras menunjukkan adanya keterkaitan antara variabel ekonomi makro dengan perilaku konsumsi masyarakat. Harga beras yang meningkat dapat menekan konsumsi, sedangkan peningkatan pendapatan melalui UMP dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Namun demikian, efektivitas peningkatan pendapatan terhadap konsumsi sangat bergantung pada laju inflasi, terutama inflasi pangan.

Dengan demikian, kajian mengenai harga beras dan pendapatan UMP terhadap konsumsi beras di Sumatera Utara menjadi penting untuk memahami dinamika ekonomi masyarakat serta perubahan daya beli dari tahun ke tahun berdasarkan data empiris yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan library research dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kepustakaan digunakan karena data yang dianalisis diperoleh melalui berbagai sumber tertulis dan publikasi resmi, bukan melalui observasi atau wawancara langsung di lapangan. Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih untuk menggambarkan perkembangan data dalam bentuk angka sehingga dapat dianalisis secara sistematis berdasarkan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta beberapa sumber literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh lembaga resmi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data statistik tahunan periode 2010–2026 sesuai fokus penelitian, seperti data pendapatan per kapita, upah minimum, konsumsi masyarakat, maupun data lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengakses publikasi resmi, laporan statistik, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah data diperoleh, peneliti melakukan proses pencatatan, pengelompokan, dan penyusunan data agar lebih mudah dianalisis. Data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memperlihatkan perkembangan serta perubahan data secara lebih jelas.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan data setiap tahun, mengidentifikasi pola kenaikan atau penurunan, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan data tersebut. Selain itu, hasil analisis juga dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi pada periode penelitian agar pembahasan menjadi lebih komprehensif.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan data yang diteliti berdasarkan sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan data yang diteliti berdasarkan sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rata-rata Harga Beras di Tingkat Perdagangan Besar (Grosir) Indonesia (Perusahaan)

Rata-rata Harga Beras di Tingkat Perdagangan Besar (Grosir) Indonesia (Perusahaan)	
Tahun	Nominal (Rp)
2010	7.084,29
2011	7.889,84
2012	8.642,52
2013	8.941,02
2014	9.637,88
2015	10.915,13
2016	11.511,34
2017	11.534,93
2018	12.054,48
2019	12.910,09
2020	12.260,73
2021	10.395,00
2022	10.656,00
2023	12.465,72
2024	13.717,00
2025	13.975,00

Berdasarkan data rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar (grosir) Indonesia periode 2010–2025, terlihat bahwa harga beras cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun pada beberapa periode terjadi penurunan. Pada tahun 2010 harga beras tercatat sebesar Rp7.084,29 dan terus meningkat hingga mencapai Rp13.975,00 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga beras sebagai komoditas pangan utama mengalami tren kenaikan dalam jangka panjang.

Pada periode 2010–2015, harga beras mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp7.084,29 menjadi Rp10.915,13. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya biaya produksi pertanian, kenaikan harga pupuk dan bahan bakar, pertumbuhan jumlah penduduk, serta meningkatnya permintaan masyarakat terhadap beras. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu juga memengaruhi hasil produksi padi sehingga pasokan beras menjadi terbatas dan harga mengalami kenaikan.

Selanjutnya pada periode 2016–2019, harga beras masih mengalami kenaikan meskipun relatif lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2016 harga beras sebesar Rp11.511,34 dan meningkat menjadi sekitar Rp12.910,09 pada tahun 2019. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa permintaan beras tetap tinggi karena beras merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia yang memiliki sifat permintaan *inelastis*. Artinya, meskipun harga meningkat, masyarakat tetap membeli beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Namun, pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan harga beras, dari Rp12.260,73 menjadi Rp10.395,00. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan aktivitas ekonomi dan distribusi pangan. Pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan dan menjaga ketersediaan stok beras melalui operasi pasar sehingga harga relatif lebih terkendali.

Setelah tahun 2021, harga beras kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 harga beras sebesar Rp10.656,00, kemudian meningkat cukup tajam menjadi Rp12.465,72 pada tahun 2023 dan Rp13.717,00 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 harga beras kembali naik menjadi Rp13.975,00. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya

distribusi, perubahan iklim yang memengaruhi produksi padi, inflasi pangan, serta meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa harga beras di Indonesia mengalami tren kenaikan dalam jangka panjang. Kenaikan harga beras dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, stabilitas harga beras menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

Tabel 2. Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara	
Tahun	Nominal (Rp)
2010	965.000
2011	1.035.500
2012	1.200.000
2013	1.375.000
2014	1.505.850
2015	1.625.000
2016	1.811.875
2017	1.961.354
2018	2.132.188
2019	2.303.403
2020	2.499.423
2021	2.499.423
2022	2.522.609
2023	2.710.493
2024	2.809.915
2025	2.992.559

Berdasarkan data Upah Minimum Provinsi (UMP) periode 2010–2025, terlihat bahwa UMP mengalami peningkatan hampir setiap tahun. Pada tahun 2010 UMP tercatat sebesar Rp965.000 dan terus meningkat hingga mencapai Rp2.992.559 pada tahun 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menyesuaikan tingkat upah dengan kebutuhan hidup masyarakat serta kondisi perekonomian.

Pada periode 2010–2015, UMP mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari Rp965.000 menjadi Rp1.625.000. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi, serta meningkatnya kebutuhan hidup layak masyarakat. Pemerintah menetapkan UMP dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan, tingkat inflasi, dan kebutuhan dasar pekerja agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya pada periode 2016–2020, UMP terus mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2016 UMP sebesar Rp1.811.875 dan meningkat menjadi Rp2.499.423 pada tahun 2020. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pendapatan nominal

masyarakat sehingga daya beli masyarakat diharapkan juga meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

Namun, pada tahun 2021 UMP tidak mengalami kenaikan dan tetap berada pada angka Rp2.499.423. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi nasional. Banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mempertahankan UMP agar kondisi ketenagakerjaan tetap stabil dan mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Setelah tahun 2021, UMP kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 UMP naik menjadi Rp2.522.609, kemudian meningkat menjadi Rp2.710.493 pada tahun 2023, Rp2.809.915 pada tahun 2024, dan mencapai Rp2.992.559 pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan kondisi ekonomi setelah pandemi serta adanya penyesuaian terhadap inflasi dan kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa UMP mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan UMP diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, peningkatan pendapatan nominal belum tentu meningkatkan kesejahteraan riil apabila tidak diimbangi dengan stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama harga beras. Jika harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan UMP, maka daya beli masyarakat tetap dapat menurun. Oleh karena itu, keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan stabilitas harga sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. Rata-rata konsumsi Beras Provinsi Sumatera Utara

Rata-rata Konsumsi Beras Provinsi Sumatera Utara	
Tahun	Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Tahun)
2010	108,33
2011	107,80
2012	107,10
2013	106,40
Rata-rata Konsumsi Beras Provinsi Sumatera Utara	
Tahun	Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Tahun)
2014	105,60
2015	104,90
2016	103,80
2017	102,70
2018	101,90
2019	100,80
2020	99,90
2021	99,10
2022	98,40
2023	97,80
2024	97,10
2025	96,50

Berdasarkan data konsumsi beras Provinsi Sumatera Utara periode 2010–2025, terlihat bahwa tingkat konsumsi beras masyarakat mengalami penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 konsumsi beras tercatat sebesar 108,33 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 96,50 kg/kapita/tahun. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan pokok.

Pada periode 2010–2015, konsumsi beras mengalami penurunan dari 108,33

kg/kapita/tahun menjadi 104,90 kg/kapita/tahun. Penurunan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengurangi konsumsi beras secara perlahan. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang lebih beragam, seperti konsumsi mi, roti, kentang, jagung, dan sumber karbohidrat lainnya sebagai alternatif pengganti beras.

Selanjutnya pada periode 2016–2020, konsumsi beras terus mengalami penurunan dari 103,80 kg/kapita/tahun menjadi 99,90 kg/kapita/tahun. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat serta meningkatnya harga beras yang menyebabkan sebagian masyarakat mulai menyesuaikan pola konsumsi mereka. Selain itu, program diversifikasi pangan yang dilakukan pemerintah turut mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada konsumsi beras sebagai makanan pokok utama.

Pada tahun 2021 hingga 2025, konsumsi beras masih menunjukkan tren penurunan. Tahun 2021 konsumsi beras sebesar 99,10 kg/kapita/tahun dan terus menurun hingga mencapai 96,50 kg/kapita/tahun pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun beras tetap menjadi makanan pokok utama masyarakat Sumatera Utara, tingkat konsumsi per kapita cenderung semakin berkurang. Faktor ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan perubahan daya beli masyarakat juga memengaruhi tingkat konsumsi beras.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa konsumsi beras di Provinsi Sumatera Utara mengalami tren penurunan dalam jangka panjang. Penurunan konsumsi ini tidak berarti bahwa masyarakat berhenti mengonsumsi beras, tetapi menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi dan diversifikasi pangan. Selain itu, hubungan antara harga beras dan pendapatan masyarakat juga memengaruhi tingkat konsumsi. Ketika harga beras meningkat sementara pendapatan masyarakat tidak meningkat secara signifikan, maka daya beli masyarakat dapat menurun sehingga konsumsi beras ikut berkurang.

Dengan demikian, perkembangan konsumsi beras di Sumatera Utara menunjukkan adanya pengaruh faktor ekonomi dan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan serta mendorong diversifikasi konsumsi pangan agar ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga.

Berdasarkan data harga beras, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan konsumsi beras di Sumatera Utara periode 2010–2025, terlihat adanya hubungan yang saling berkaitan antara ketiga variabel tersebut dalam memengaruhi kondisi ekonomi dan pola konsumsi masyarakat. Data menunjukkan bahwa harga beras dan UMP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan tingkat konsumsi beras masyarakat justru mengalami penurunan secara bertahap. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan harga dan tingkat pendapatan memberikan dampak terhadap perilaku konsumsi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok.

Harga beras selama periode penelitian mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 harga beras tercatat sebesar Rp7.084,29 dan meningkat menjadi Rp13.975,00 pada tahun 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan terjadinya inflasi pangan pada komoditas beras. Peningkatan harga beras dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya biaya produksi pertanian, kenaikan harga pupuk dan bahan bakar, biaya distribusi, perubahan iklim yang memengaruhi hasil panen, serta meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan permintaan beras terus meningkat setiap tahun.

Menurut teori ekonomi mikro, beras termasuk barang kebutuhan pokok yang memiliki sifat permintaan *inelastis*. Mankiw (2018) menjelaskan bahwa barang kebutuhan pokok akan tetap dikonsumsi meskipun harga mengalami kenaikan karena barang tersebut merupakan kebutuhan utama masyarakat. Hal ini terlihat pada masyarakat Sumatera Utara yang masih menjadikan beras sebagai makanan pokok utama sehari-hari. Oleh karena itu,

kenaikan harga beras tidak secara langsung menyebabkan masyarakat berhenti mengonsumsi beras, tetapi lebih memengaruhi daya beli dan pola pengeluaran rumah tangga.

Kenaikan harga beras yang terjadi secara terus-menerus memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kelompok masyarakat ini cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pangan. Ketika harga beras meningkat, pengeluaran rumah tangga untuk pangan juga meningkat sehingga masyarakat harus menyesuaikan pengeluaran pada kebutuhan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan daya beli riil masyarakat mengalami penurunan dan berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Di sisi lain, pendapatan masyarakat yang diukur melalui Upah Minimum Provinsi (UMP) juga mengalami peningkatan selama periode penelitian. Pada tahun 2010 UMP sebesar Rp965.000 dan meningkat menjadi Rp2.992.559 pada tahun 2025. Peningkatan UMP menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyesuaian upah terhadap inflasi dan kebutuhan hidup layak. Secara teori, peningkatan pendapatan seharusnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, termasuk kebutuhan pangan seperti beras.

Dalam teori konsumsi Keynes (1936), pendapatan merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Ketika pendapatan meningkat, kemampuan konsumsi masyarakat juga meningkat meskipun peningkatannya tidak selalu dalam proporsi yang sama. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan UMP tidak diikuti oleh peningkatan konsumsi beras. Hal ini terlihat dari data konsumsi beras masyarakat Sumatera Utara yang mengalami penurunan dari 108,33 kg/kapita/tahun pada tahun 2010 menjadi 96,50 kg/kapita/tahun pada tahun 2025.

Penurunan konsumsi beras tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat tidak selalu menyebabkan peningkatan konsumsi terhadap pangan pokok. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Seiring meningkatnya pendapatan dan perkembangan gaya hidup, masyarakat mulai melakukan diversifikasi pangan dengan mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti mi, roti, kentang, jagung, dan makanan cepat saji. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat juga menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengurangi konsumsi beras secara berlebihan.

Selain faktor perubahan pola konsumsi, penurunan konsumsi beras juga dipengaruhi oleh perubahan struktur pengeluaran rumah tangga masyarakat. Berdasarkan Hukum Engel, ketika pendapatan masyarakat meningkat maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan cenderung menurun, sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan non-pangan meningkat. Masyarakat mulai mengalokasikan pendapatannya untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, teknologi, hiburan, dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, meskipun pendapatan meningkat, konsumsi beras per kapita dapat mengalami penurunan karena kebutuhan masyarakat menjadi semakin beragam.

Kenaikan harga beras yang relatif lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan riil masyarakat juga menjadi salah satu penyebab menurunnya konsumsi beras. Walaupun UMP meningkat hampir setiap tahun, kenaikan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi inflasi pangan dan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Akibatnya, daya beli masyarakat masih mengalami tekanan sehingga masyarakat harus lebih selektif dalam mengatur pengeluaran rumah tangga agar seluruh kebutuhan tetap dapat terpenuhi.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi kelompok yang paling merasakan dampak kenaikan harga beras. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ketika harga

beras meningkat, kemampuan mereka dalam mempertahankan tingkat konsumsi menjadi semakin terbatas. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpendapatan lebih tinggi memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beras dan pendapatan masyarakat yang diukur melalui UMP memiliki pengaruh terhadap tingkat konsumsi beras di Sumatera Utara. Kenaikan harga beras cenderung menurunkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi beras mengalami penurunan. Sementara itu, peningkatan UMP membantu meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi pangan. Selain faktor ekonomi, perubahan pola konsumsi, diversifikasi pangan, dan perubahan gaya hidup masyarakat juga turut memengaruhi penurunan konsumsi beras di Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh harga beras dan pendapatan masyarakat yang diukur melalui Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap konsumsi beras di Sumatera Utara periode 2010–2025, dapat disimpulkan bahwa harga beras, pendapatan masyarakat, dan konsumsi beras memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beras mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan konsumsi beras masyarakat cenderung mengalami penurunan secara bertahap.

Kenaikan harga beras menunjukkan adanya inflasi pangan yang memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di sisi lain, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara juga mengalami peningkatan selama periode penelitian sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyesuaikan pendapatan dengan kebutuhan hidup layak.

Meskipun UMP meningkat, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Kondisi tersebut menyebabkan daya beli riil masyarakat masih mengalami tekanan sehingga memengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Selain faktor ekonomi, penurunan konsumsi beras juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi, diversifikasi pangan, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai mengonsumsi sumber karbohidrat selain beras.

Dalam perspektif ekonomi mikro, beras merupakan barang kebutuhan pokok yang bersifat inelastis sehingga masyarakat tetap mengonsumsinya meskipun harga mengalami kenaikan. Namun demikian, kenaikan harga beras tetap berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga dan kemampuan konsumsi masyarakat. Berdasarkan Hukum Engel, ketika pendapatan masyarakat meningkat maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan cenderung menurun, sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan meningkat. Hal ini menyebabkan konsumsi beras per kapita masyarakat Sumatera Utara mengalami penurunan meskipun pendapatan nominal meningkat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga beras cenderung memengaruhi penurunan konsumsi beras masyarakat karena menurunkan daya beli masyarakat. Sementara itu, peningkatan pendapatan melalui UMP membantu mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya mampu mengimbangi inflasi pangan dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, stabilitas harga beras, pengendalian inflasi pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung ketahanan pangan di Sumatera Utara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras agar tidak mengalami kenaikan yang terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah juga perlu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperbaiki sistem distribusi pangan, serta memperkuat kebijakan pengendalian inflasi pangan agar harga kebutuhan pokok lebih stabil.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan kondisi inflasi. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat secara riil, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya dapat lebih terjamin.

Masyarakat juga diharapkan mulai menerapkan pola konsumsi pangan yang lebih beragam melalui diversifikasi pangan sehingga ketergantungan terhadap beras dapat dikurangi. Diversifikasi pangan dapat membantu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi konsumsi beras, seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pola konsumsi masyarakat, inflasi, maupun kondisi sosial ekonomi lainnya sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih luas dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025). *Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2025*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara. <https://sumut.bps.go.id/en/publication/2025/06/05/02412526a8ad204a9f2f9cdd/provinsi-sumatera-utara-dalam-infografis-2025.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar (grosir) Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/20/295/1/rata-rata-harga-beras-di-tingkat-perdagangan-besar-grosir-indonesia.html>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). *Data Upah Minimum Provinsi Indonesia Tahun 2025*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. <https://kemnaker.go.id>
- Keynes, John Maynard. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
- Mankiw, N. Gregory. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Sukirno, Sadono. (2016). *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.